

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Konsep Upaya Hukum Kasasi dalam Peradilan Pidana Di Indonesia Sesuai Dengan Asas Hukum Peradilan “Cepat, Sederhana, Biaya Ringan”

Tujuan utama dalam suatu proses di muka Pengadilan adalah untuk memperoleh putusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap. Akan tetapi, setiap putusan yang dijatuhkan oleh Hakim belum tentu dapat menjamin kebenaran secara yuridis, karena putusan itu tidak lepas dari kekeliruan dan kekhilafan, bahkan tidak mustahil bersifat memihak. Agar kekeliruan dan kekhilafan itu dapat diperbaiki, maka demi tegaknya kebenaran dan keadilan, terhadap putusan hakim itu dimungkinkan untuk diperiksa ulang. Cara yang tepat untuk dapat mewujudkan kebenaran dan keadilan itu adalah dengan melaksanakan upaya hukum. Jadi, upaya hukum merupakan upaya atau alat untuk mencegah atau memperbaiki kekeliruan dalam suatu putusan.

Membahas mengenai konsep upaya hukum kasasi dalam peradilan pidana di Indonesia agar sesuai dengan asas hukum peradilan “cepat, sederhana, biaya ringan”, terlebih dahulu kita memahami maksud dari pada kata konsep dalam kalimat tersebut. Secara istilah bahwa konsep berasal dari bahasa latin “Conceptum” yang berarti sesuatu yang dipahami. Secara garis besar definisi konsep adalah suatu hal umum yang menjelaskan atau menyusun suatu peristiwa, objek, situasi, ide, atau akal pikiran dengan tujuan untuk memudahkan komunikasi antar manusia dan memungkinkan manusia untuk berpikir lebih baik. Jika dikaitkan dengan judul penulis, maka disini yang

dimaksud dengan konsep ialah merupakan suatu hal umum yang menjelaskan atau menyusun suatu peristiwa yaitu proses upaya hukum kasasi dalam peradilan pidana di Indonesia agar sesuai dengan asas hukum peradilan “cepat, sederhana, biaya ringan”.

Kemudian membahas pula mengenai upaya hukum kasasi, bahwasannya sebagaimana termaktub dalam Pasal 244 KUHAP menyatakan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain daripada Mahkamah Agung, terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas. Selain pengertian dari KUHAP tersebut, kasasi juga dapat diartikan bahwa kasasi merupakan salah satu upaya hukum biasa dan merupakan hak asasi yang diberikan peraturan perundang-undangan kepada pencari keadilan. Peradilan kasasi dapat diartikan memecahkan atau membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan, karena dinilai salah menerapkan hukum. Meskipun secara normatif Mahkamah Agung memiliki kewenangan mengadili perkara kasasi tidak serta merta dan pasti melakukannya, melainkan tergantung pihak pencari keadilan atau penuntut umum, mengajukan kasasi atau tidak dan tergantung syarat lain yang harus dipenuhi. Secara yuridis formal permohonan kasasi dapat diterima apabila memenuhi syarat formal antara lain: tenggang waktu mengajukan kasasi, surat kuasa khusus sempurna, masih ada upaya hukum yang disediakan oleh hukum acara (*verzet*, *banding*), memberikan memori kasasi dalam waktunya.

Selanjutnya dalam pelaksanaannya salah satu asas esensial yang terkandung dalam KUHAP dalam kaitannya dengan proses pemeriksaan perkara di pengadilan yang sekaligus merupakan interpretasi Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan. Asas ini dimaksudkan untuk memberi perlindungan dan kepastian hukum bagi tersangka atau terdakwa yang menjalani proses peradilan.

Peradilan sederhana adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan acara yang efisien dan efektif. Asas ini menjelaskan bahwa sebutan sederhana dimaksudkan tidak rumit, tidak berbelit-belit dan tidak dipersulit, selanjutnya dari kata “peradilan cepat” tersebut bermakna bahwasannya tidak dalam waktu yang lama, tidak bertele-tele, artinya proses peradilan tidak banyak ditunda atau diundur sehingga diharapkan mengurangi kemungkinan perkara akan terkatung-katung. Namun demikian, dalam pemeriksaan dan penyelesaiannya perkara tersebut tidaklah boleh mengorbankan ketelitian dalam mencari kebenaran dan keadilan. Kemudian dari aspek peradilan biaya ringan sendiri adalah biaya perkara yang dapat dipikul oleh tersangka khususnya, masyarakat dan negara pada umumnya. Asas ini menjelaskan bahwasannya pada proses peradilan tidak memakan biaya yang banyak sehingga tidak membebani orang yang menjalani proses peradilan. Maka ketiga prinsip inilah pada dasarnya merupakan satu kesatuan dan tidak dapat berdiri sendiri-sendiri karena beriringan atau berkaitan satu dengan yang lain.

KUHAP telah meletakkan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan tersebut sebagai suatu landasan, akan tetapi apakah asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan tersebut ini akan dapat menjadi kenyataan dalam rangka penegakan hukum dan keadilan di Indonesia? Namun hingga saat ini belum ada ketentuan hukum pidana yang mengatur sanksi atas pelanggaran yang dilakukan terhadap asas-asas tersebut, sehingga tingkat kepatuhan penegak hukum untuk terwujudkan asas tersebut masih rendah.

Melihat dari sistem Peradilan Pidana di Indonesia ini memiliki karakteristik dengan alur yang diawali suatu perkara pidana yang timbul dimasyarakat ditangani oleh subsistem kepolisian, kemudian dugaan tindak pidana itu diselidiki dan disidik untuk dilimpahkan ke subsistem kejaksaan. Setelah menerima dan mempelajari serta menyidik melalui internal kejaksaan, maka dilimpahkan ke subsistem kehakiman untuk ditindaklanjuti dengan persidangan. putusan yang telah berkukuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dilaksanakan eksekusinya oleh subsistem Lembaga Pemasyarakatan.

Sebenarnya dalam proses peradilan pada lingkup hukum pidana merupakan tahapan penting yang diselenggarakan guna untuk menemukan kebenaran, keadilan, dan ketertiban hukum. Sehingga sebagaimana asas yang sudah diatur dalam pasal 2 ayat (4) dan pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 beserta penjelasan umumnya angka 3 huruf e KUHAP, bahwa dilakukannya peradilan secara sederhana, cepat dan biaya ringan tersebut dimaksudkan agar terdakwa tidak diperlakukan dan diperiksa berlarut-larut, memperoleh kepastian procedural hukum, serta proses administrasi biaya

perkara yang ringan dan tidak terlalu membebani sehingga biaya perkara dapat dijangkau oleh masyarakat.

Kemudian memandang terhadap penerapan asas ini dalam praktik peradilan dapatlah diberikan nuansa bahwa peradilan cepat dan sederhana tampak dengan adanya pembatasan waktu penanganan perkara bahkan hingga pada tingkat upaya hukum kasasi, sebagaimana telah diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 214/KMA/SK/XII/2014 tanggal 31 Desember 2014. SK tersebut mengatur tentang point pokok dalam jangka waktu penanganan perkara di Mahkamah Agung. Dimana penanganan perkara pada Mahkamah Agung harus diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 250 (dua ratus lima puluh) hari, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, terhitung mulai penerimaan berkas hingga pengiriman kembali berkas ke pengadilan pengaju.

Dalam hal penegakan hukum melalui proses peradilan baiknya tidak terbatas hanya pada kepentingan hukum secara yuridis saja, namun harus pula mengandung unsur sebagai proses Pendidikan masyarakat kearah terbinanya suatu kesadaran hukum yang pada akhirnya akan menunjang pelaksanaan hukum acara pidana itu sendiri. Proses pendidikan yang sebaik-baiknya secara sederhana dapat dilakukan melalui perilaku positif dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari, seperti halnya tidak melakukan memberikan atau menerima penyuapan, gratifikasi, atau sejenisnya hanya demi kepentingan sendiri yang kemudian memperjual belikan hukum dengan mudahnya. Melalui hal demikianlah maka niscaya penegakan hukum akan tercapai dengan baik

dan memberikan iklim positif kepada pembentukan budaya hukum masyarakat yang dikehendaki.

Budaya hukum yang baik pada suatu masyarakat tersebutlah akan membantu menciptakan ketertiban hukum sehingga segala proses yang berkaitan dengan hukum dapat diselenggarakan secara efektif dan efisien. Masyarakat yang memiliki kemampuan pemahaman hukum yang cukup akan dapat menghadapi permasalahan hukum yang dialaminya secara mandiri, dan proses yang dilaluinya akan selalu diarahkan kepada prinsip/ asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan.

Sehingga terwujud tidaknya keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan yang bersesuaian dengan keinginan dan harapan negara sangat ditentukan oleh integritas sikap dan perilaku para pemegang peran ketika mereka melaksanakan penegakan hukum. Bagi aparat penegak hukum sebagai pemegang peran dalam mengawas, memeriksa, dan memutus perkarahukum, tentunya yang diharapkan adalah integritas sikap dan perilaku standar yang berlaku baginya sebagai aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum senantiasa berwatak iman dan taqwa, adil, berwibawa, berbudi luhur, objektif, terampil, inovatif dan responsive terhadap tuntutan tegaknya hukum dan keadilan dari masyarakat. Maka tindakan yang dilakukan pada tataran empiris dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan hukum kepada Tuhan Yang Maha Esa, masyarakat luas dan juga dirinya sendiri.

Mengenai proses penegakan hukum di Indonesia ini M. Yahya Harahap, S.H., pada “seminar wawasan penegakan hukum dalam PJPT II” di Jakarta pada tanggal 7 Desember 1994 dalam makalahnya menyatakan bahwa:

“Semua pihak merasakan kenyataan betapa lama dan panjang waktu yang dibutuhkan menunggu penyelesaian perkara, sampai diperoleh keputusan Peradilan yang berkekuatan hukum tetap. Pihak peradilan sendiri mengakui hal itu, dalam setiap pertemuan, salah satu topik yang tidak pernah dilupakan adalah penyelesaian perkara cepat. Tentang hal ini sering orang mengajukan kritik akan kebenaran asas sederhana, cepat dan biaya ringan yang dirumuskan Pasal 4 ayat (2) UU No. 14 Tahun 1970 (sekarang UU No. 48 Tahun 2009). Seolah-olah asas tersebut hanya hiasan rumusan mati. Peradilan tidak mampu menggerakkan dan mendinamisir ide, jiwa dan semangat pasal dimaksud. Akan tetapi, apabila masalah kelambatan penyelesaian perkara dikaji lebih dalam, tidak tepat untuk menjatuhkan kesalahan semata-mata kepada pundak peradilan. Pihak yang berperkara maupun penasehat atau kuasa ikut ambil bagian:

- Penggunaan upaya hukum yang IRASIONAL dengan maksud untuk mengulur penyelesaian;
- Hal ini jelas dilandasi motivasi kecenderungan dan itikad buruk, karena mereka telah merubah tujuan berperkara, dari menegakkan KEBENARAN dan KEADILAN (*to enforce the truth of justice*) menjadi mencari KEMENANGAN (*winning*) atau KEKALAHAN (*loosing*). Menang dianggap adil, meskipun kemenangan diperoleh dengan kolusi, penyuapan, penipuan dan kebohongan. Sebaliknya, kekalahan dianggap ketidakadilan, walaupun putusan yang dijatuhkan peradilan sudah benar dan adil.

Jadi kalau kita jujur pada diri sendiri dan berani bercermin melihat cacat dan bopeng yang ada pada wajah kita, kelambatan penyelesaian perkara tidak semata-mata ulah aparat peradilan. Tetapi ulah semua pihak yang terlibat dalam proses. Terasuk para pihak yang berperkara maupun kelompok pengacara yang meperdaya para pihak untuk mempergunakan semua upaya yang ada, dengan cara memberi OPINI HUKUM (*legal opinion*) yang menyesatkan. Namun demikian saya menyadari factor kelambatan itu ada juga dipundakbadan dan aparat peradilan.”

Dalam makalah tersebut juga diungkap mengenai gambaran lama dan lambatnya penyelesaian perkara yakni sebagai berikut:

“....salah satu citra negatif adalah lama dan lambatnya penyelesaian perkara untuk memperoleh penyelesaian sampai putusan memperoleh kekuatan hukum

tetap, rata-rata memakan waktu 10 (sepuluh) sampai 12 (dua belas) tahun. Gambaran tahapan penyelesaian dapat dikemukakan:

- Tingkat peradilan pertama : 1 sampai 2 tahun
- Tingkat banding : 1 sampai 2 tahun
- Tingkat kasasi : 1 sampai 3 tahun
- Proses peninjauan kembali : 2 sampai 3 tahun

Lukisan penyelesaian di atas merupakan gambaran umum. Tentu ada penyelesaian yang lebih cepat dari itu. Satu dari sekian perkara mungkin selesai dari tingkat pertama sampai putusan memperoleh kekuatan tetap 5 (lima) atau 6 (enam) tahun. Sebaiknya, banyak ditemukan penyelesaian yang memakan waktu sampai 15 (lima belas) atau 20 (dua puluh) tahun.”

Sehingga memang dapat dinilai banyak faktor yang mempengaruhi belum dapat diterapkannya asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan tersebut antara lain faktor jumlah perkara yang dilanjutkan pada pengadilan tingkat pertama, banding hingga pada tingkat kasasi yang tidak sebanding dengan jumlah hakim yang menangani kasus-kasus pidana dengan berbagai variasinya tersebut. Selain itu, dalam proses persidangan, tersangka yang didampingi penasehat hukumnya yang tentunya berjabaku untuk membela tersangka guna menghindari tercidainya hak tersangka dalam proses persidangan. Tindakan-tindakan pembelaan yang ditampilkan penasehat hukum senantiasa menunjukkan kualitasnya sejak dimulainya pemeriksaan dari tingkat penyidikan hingga proses di muka sidang.

Salah satu tindakan pembelaan senantiasa dilakukan adalah pengajuan eksepsi yang pada akhirnya juga lebih banyak berputar-putar pada hal-hal yang sama sekali tidak memberikan kontribusi berarti pada pokok perkara. Sehingga kerap menimbulkan kesan “kesia-siaan” dan “mengulur-ulur waktu”. Oleh karenanya, indikasi dilanggarnya asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan tersebut sudah muncul sejak awal persidangan.

Disamping upaya-upaya hukum banding, kasasi dan peninjauan kembali hingga diperolehnya putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijcde*) yang diakomodasikan mealui undang-undang merupakan salah satu faktor yang menurut penulis menyediakan peluang untuk tidak terpenuhinya asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan tersebut. Jenjang upaya hukum tersebut otomatis memperpanjang waktu yang tentunya tidak lagi mencerminkan biaya yang murah, apalagi mencerminkan terlaksananya penjatuhan pidana dengan segera mungkin.

Dengan dilakukannya upaya hukum kasasi, tentunya berdampak pada peradilan yang berjenjang dan bertingkat, membutuhkan waktu lama dan membutuhkan biaya yang mahal, karena setiap tingkatan upaya hukum dikenakan membayar biaya baik pada tingkat banding maupun pada tingkat kasasi. Dilain pihak asas peradilan sebagaimana yang telah termaktub dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, pada pasal 2 ayat (4) yang menyebutkan bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan. Asas ini bila direnungkan secara mendalam menghendaki peradilan yang sederhana atau tidak terlalu *formal legalistic*, acara yang ruwet dan berkepanjangan dan lebih mengutamakan keadilan dari pada kepastian hukum. Waktu yang dibutuhkan dalam proses yang sederhana adalah cepat dan biaya yang dibutuhkan dalam proses menjadi terjangkau oleh siapapun termasuk masyarakat tidak mampu. Asas ini masih menjadi keniscayaan dan masih dalam *das sollen*, karena realitanya semua proses

peradilan pidana, prosesnya melalui beberapa institusi termasuk kompetensi absolutnya.

Realitasnya KUHAP belum mengaplikasikan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Sistem peradilan pidana mendasarkan: *“is a violation of the state, defined by law breaking and gulty”*. Keadilan dipahami sebagai terbuktinya dakwaan dan penjatuhan pidana kepada pelaku oleh negara sebagai pemegang kedaulatan penjatuhan pidana melalui alat-alatnya. Otoritas demikian pada akhirnya justru berimbas pada kondisi tidak terwakilinya kepentingan korban dan masyarakat dalam sistem. Akibat yang timbul bukan penyelesaian, melainkan masalah baru antara lain:

- Proses dalam sistem peradilan pidana dianggap rumit, lama dan biaya tinggi.
- Sistem yang tidak sanggup untuk menampung aspirasi korban dan masyarakat sebagai pihak yang dirugikan baik secara langsung atau tidak langsung atas tindakan pidana yang ada.
- Penyelesaian akhir dari suatu perkara pidana yang dianggap tidak menguntungkan baik bagi korban, masyarakat maupun terhadap pelaku itu sendiri.

Sehingga proses perkara pidana yang cepat dan sederhana di Indonesia ini termasuk pada upaya hukum kasasi dalam peradilan pidana idealnya dapat dijalankan tanpa jajaran paralel badan peradilan, melainkan dapat ditempuh dua cara lain, yaitu:

- (1) Membentuk sub bagian khusus perkara ringan disamping perkara biasa;

- (2) Fungsi lembaga supervise tidak perlu dibentuk sendiri, tetapi dibebankan kepada setiap pimpinan dari masing-masing dinas ditingkat daerah selaku satuan tugas dan pada tingkat pusat pelaksana yang terdiri atas pimpinan Kepolisian, Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung dan Badan Kehakiman lain yang ditunjuk.

Maka untuk mendorong konsep upaya hukum kasasi dalam peradilan pidana untuk tercapainya asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan dapat diwujudkan dengan bantuan sarana penunjang berupa:

- 1) Kerjasama secara koordinatif dan tindakan yang sinkron diantara para petugas;
- 2) Membentuk badan koordinasi yang bersifat fungsional untuk pengawasan;
- 3) Proses verbal interogasi dan surat tuduhan disusun dengan singkat dan mudah dimengerti;
- 4) Meningkatkan diferensiasi jenis kejahatan atau pelanggaran disertai intensifikasi pembagian tugas penyelesaian perkara.

Pembenahan sistem peradilan pidana akhirnya tidak dapat hanya tergantung dalam pemahaman harfiah dari penegak hukum terhadap asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan saja, namun dari situ semua adalah nurani penegak hukum, pencari keadilan, penguasa, legislative dan sistem yang membina institusi peradilan juga menjadi factor dominan. Semua faktor itu jika dapat dimaksimalkan bukan tidak mungkin sistem peradilan pidana di Indonesia ini termasuk pada upaya hukum kasasi lebih baik lagi dan akan menciptakan peradilan yang bersih, jujur, objektif dan adil.

B. Urgensi Perubahan Konsep Permohonan Upaya Hukum Kasasi dalam Peradilan Pidana Di Indonesia

Berkenaan dengan pelaksanaan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam memeriksa suatu perkara, penulis berpendapat bahwa asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan ini dimaksudkan untuk memberi perlindungan dan kepastian hukum bagi para pihak yang menjalani proses peradilan dan pada dasarnya asas ini harus dijalankan dalam setiap proses peradilan, namun kenyataannya tidak semua proses penegakan hukum mampu mewujudkan asas yang dimaksud, karena dalam kenyataannya proses dalam peradilan seringkali dilaksanakan selama lebih dari 6 bulan bahkan juga tahunan dan diwajibkan membayar biaya perkara yang kenyataannya tidak sedikit.

Dilain sisi juga dengan dimudahkannya para pihak untuk mengajukan permohonan kasasi, maka banyak dari perkara tersebut tidak akan segera terselesaikan dengan cepat dan juga tidak segera mendapatkan putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*). Kemudian juga hal tersebut dapat memungkinkan juga timbulnya mafia-mafia peradilan yang memperdagangkan hukum secara besar-besaran. Mafia peradilan adalah perbuatan yang bersifat sistematis, konspiratif, kolektif dan terstruktur yang dilakukan oleh aktor tertentu (aparatus penegak hukum dan pencari keadilan) untuk memenangkan kepentingannya melalui penyalahgunaan wewenang, kesalahan administrasi dan perbuatan melawan hukum yang mempengaruhi proses penegakan hukum sehingga menyebabkan rusaknya sistem hukum dan tidak terpenuhinya rasa keadilan. Salah satu bukti data yaitu dari Masyarakat Pemantau Peradilan

Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia (MAPPI FHUI), sepanjang tahun 2016 saja terdapat 13 orang dalam lembaga peradilan yang diduga terlibat kasus suap atau kasus korupsi. Dari 13 orang tersebut, satu di antaranya adalah Sekretaris MA Nurhadi. Lalu ada seorang Kasubdit Kasasi Perdata di MA, 5 orang hakim, 3 orang panitera, 2 orang pegawai Pengadilan Negeri, serta seorang Wakil Kepala Pengadilan Tinggi. Hal tersebut mampu menciderai penegakan hukum yang ada di negara ini, serta akan membuat masyarakat umum menurun kepercayaannya terhadap lembaga peradilan.

Meskipun hakikat upaya hukum kasasi bertujuan sangat baik dalam penegakan hukum dan pengembangan ilmu hukum, akan tetapi secara umum fungsi peradilan yang dilaksanakan MA sejak lama selalu mendapat kritikan, karena menurut banyak kalangan penyelesaian sengketa dirasakan sangat kompleks, lambat, dan berbiaya mahal. Kritikan ini tentunya bukan tanpa alasan, karena faktanya penyelesaian suatu perkara kasasi di MA dapat menghabiskan waktu 2 s/d 3 tahun, bahkan lebih dari pada itu.⁴⁶ Fakta tersebut berkaitan dengan sebuah penelitian di tahun 1991 s/d 1995 yang menyatakan rata-rata penumpukan perkara di MA mencapai kurang lebih sebanyak 11.000 perkara kasasi setiap tahunnya.⁴⁷ Selanjutnya di tahun 1995 s/d 2000, khusus perkara kasasi dari perkara yang masuk menyisakan perkara sebanyak 9.707.⁴⁸

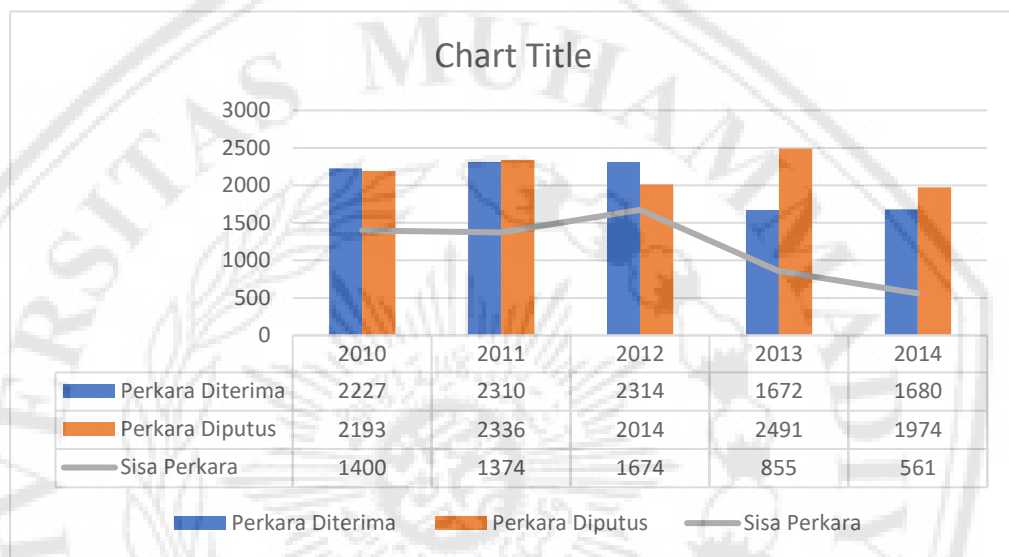
⁴⁶ Ali Budiardjo, dkk, Reformasi Hukum di Indonesia (Hasil Studi Perkembangan Hukum – Proyek Bank Dunia) (Jakarta: Siber Konsultan, 2000). hlm. 116.

⁴⁷ Ibid. Hal 110.

⁴⁸ Faisal A. Rani, 2002, Fungsi dan Kedudukan Mahkamah Agung Sebagai Penyelenggara Kekuasaan Kehakiman Yang Merdeka Sesuai Dengan Paham Negara Hukum, Disertasi, Program Pascasarjana, Universitas Padjadjaran, Bandung, hlm. 311

Salah satu faktor terjadinya penumpukan perkara ini sebagai akibat perkara di MA dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan jumlahnya.

Pada catatan Laporan Akhir Tahun Mahkamah Agung (MA) baru 5 tahun kemarin juga dari tahun 2010-2014 mencatat rasio kasasi pada perkara pidana, sebagaimana terurai berikut :



“MA kembali mengukir sejarah karena rasio produktivitas tertinggi dalam memutus perkara dan sisa perkara terendah selama berdirinya MA,” ujar Ketua Mahkamah Agung, M. Hatta Ali, dalam sidang pleno istimewa Penyampaian Laporan Tahunan MA Tahun 2015 di Assembly Hall Jakarta Convention Centre, Jakarta, Selasa (01/3).⁴⁹

Guru besar Universitas Indonesia (UI), Jimly Asshidiqie pula menilai bahwa ada masalah serius dalam peradilan di Indonesia. Salah satunya adalah penumpukan perkara. "Jumlah perkaranya sangat banyak, mencapai tiga juta," kata Jimly di Jakarta, Jumat 19 Februari 2010. Menurut Jimly, penumpukan

⁴⁹ Agus Sahbani. 2016. "MA Berhasil Kikis Tumpukan Perkara". <http://www.hukumonline.com>. Diakses tanggal 13 Oktober 2016, pukul 10.01.11.

perkara itu disebabkan adanya kebiasaan penegak hukum melempar perkara ke atas. Misalnya, kata Jimly, hakim di pengadilan negeri dengan mudahnya memutus dan berpikir nanti ada banding. "Demikian pula di tingkat pengadilan tinggi," kata dia.

Anggota Dewan Pertimbangan Presiden itu menilai masalah perkara tersebut bisa berimplikasi pada kualitas penanganan perkara dan putusan yang dijatuhkan. "Termasuk manajemen perkara oleh majelis," kata dia. Hal tersebut menyebabkan hakim tidak bisa lagi mempertimbangkan profesionalisme kedepannya. Kata Jimly, sistem peradilan yang demikian tidak efektif.⁵⁰

Adapun pula perkara yang diupayakan hukum kasasi selesai dalam waktu beberapa tahun. Salah satunya yaitu kasus penggelapan oleh bank swasta nasional disemarang dengan Irton Tabrani. Perkara kasasi tersebut yang tidak ada kejelasan selama 3 tahun silam lamanya semenjak dimohonkan pada tahun 2012. Hal tersebut membuat tertundanya pada eksekusi pidana yang diberikan kepada terdakwa yang sudah diputus oleh pengadilan negeri maupun bahkan pengadilan tinggi.⁵¹

Terhadap kondisi yang demikian, para pencari keadilan harus menunggu waktu yang cukup lama, tanpa kejelasan kapan perkaranya berkekuatan hukum tetap dan dapat mempunyai nilai eksekutorial. Akibatnya, timbul kerugian

⁵⁰ Ita Lismawati F. Malau dan Fadila Fikriani Armadita. 2010. "Penumpukan perkara masalah serius peradilan". <http://nasional.news.viva.co.id>. Diakses tanggal 13 Oktober 2016, pukul 10.01.11.

⁵¹ Rustam Aji. 2016. "Tiga Tahun Menunggu Eksekusi, Irton Merasa Jadi Korban Dugaan Permainan Kasasi MA". <http://jateng.tribunnews.com>. Diakses tanggal 10 Januari 2017, pukul 15.20.10.

yang dialami pencari keadilan, yaitu selain bersifat materiil juga bersifat moril, dan yang bersifat moril ini mempunyai tekanan yang berkelanjutan bagi para pencari keadilan.⁵² Banyaknya kritikan dan saran dari pihak di luar institusi MA, mendorong MA mengambil kebijakan dalam bentuk rekomendasi. Isi pokoknya bahwa untuk meningkatkan peran dan fungsi MA sebagai badan peradilan negara tertinggi, dan terwujudnya asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan, maka dituntut adanya pembatasan upaya hukum kasasi. Selain itu, dengan adanya pembatasan upaya hukum kasasi, MA akan lebih berkonsentrasi pada pemeriksaan perkara tertentu sehingga dapat berpengaruh pada perkembangan dan unifikasi hukum melalui yurisprudensi.⁵³

Terhadap permasalahan menumpuknya perkara di MA, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) berdasarkan keputusannya berpendapat bahwa terjadinya penumpukan perkara tersebut dikarenakan :

- a) Adanya kecenderungan pengajuan upaya hukum ke tingkat kasasi yang tidak di imbangi dengan kecepatan putusan perkara.
- b) Kelambanan dan kurang profesionalnya aparatur peradilan di MA.
- c) Terdapatnya indikasi Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

Belum adanya peraturan yang tegas mengenai pembatasan perkara kasasi.⁵⁴

⁵² Panggabean, Henry P., 2001, Fungsi Mahkamah Agung Dalam Praktik Sehari-hari – Upaya Penanggulangan Tunggakan Perkara dan Pemberdayaan Fungsi Pengawasan Mahkamah Agung, (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 2001) , hlm.xxix.

⁵³ Mahkamah Agung RI, 1999, Pernyataan Hukum Mahkamah Agung RI Dalam Rangka Pelaksanaan TAP MPR-RI NOMOR : X/MPR/1998, MA RI, Jakarta, hlm. 5.

⁵⁴ Lampiran Keputusan MPR No.5/MPR/2003 Tentang Penugasan Kepada Pimpinan MPR RI untuk menyampaikan saran atas laporan pelaksanaan putusan MPR RI oleh Presiden, DPR, BPK, MA pada Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2003.

Dari adanya pendapat-pendapat tersebut, khususnya untuk mencari solusi terhadap masalah penumpukan perkara di MA, maka Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meresponsnya pada saat membahas mengenai Rancangan Undang-Undang (RUU) Mahkamah Agung, yaitu untuk mengurangi penumpukan perkara di MA, diwujudkan melalui pengaturan mengenai pembatasan perkara kasasi. Kemudian RUU tersebut disahkan dan diundangkan pada tanggal 15 Januari 2004 menjadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Undang-undang ini membentuk norma hukum baru mengenai pembatasan upaya hukum kasasi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 45A ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004.

Apabila mencermati tujuan penormaan pembatasan hak kasasi, secara eksplisit ditegaskan pada bagian Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tersebut, pada pokoknya menyatakan :

“Dalam Undang-Undang ini diadakan pembatasan terhadap perkara yang dapat dimintakan kasasi kepada Mahkamah Agung. Pembatasan ini di samping dimaksudkan untuk mengurangi kecenderungan setiap perkara diajukan ke Mahkamah Agung sekaligus dimaksudkan untuk mendorong peningkatan kualitas putusan Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding sesuai dengan nilai-nilai hukum dan keadilan dalam masyarakat.”

Gagasan mengenai perlunya pembatasan perkara yang dapat diajukan ke Mahkamah Agung (MA) sudah cukup lama dilontarkan sebagai respon atas permasalahan tunggakan perkara (case backlog) di Mahkamah Agung (MA).

Selain itu, muncul pula gagasan untuk menambah jumlah hakim agung untuk mengimbangi jumlah perkara yang ada. Gagasan-gagasan di atas berangkat dari asumsi bahwa penyebab utama tunggakan perkara di MA adalah karena bantaknya jumlah perkara yang masuk ke MA dan kurangnya jumlah hakim agung.

Dari permasalahan-permasalahan bermunculan sebelumnya yang sudah ada itulah maka menurut penulis disini perlu adanya rekonstruksi terhadap konsep upaya hukum kasasi, khususnya terhadap hukum pidana di Indonesia ini. Makna yang di maksud dari rekonstruksi itu sendiri ialah merupakan suatu pembaharuan pada sebuah bentuk ataupun sistemnya, yang mana tidak menghilangkan bangunan yang sudah ada namun hanya memperbaiki hal-hal yang dirasa perlu diperbaiki sesuai dengan kondisi yang terjadi saat ini. Jika dikaitkan dengan judul penulis yaitu rekonstruksi konsep upaya hukum kasasi pada peradilan pidana, maka yang perlu diperbaharui ialah pada konsep dari permohonan upaya hukum tersebut agar dibuatkan sebuah konsep baru untuk menggantikan konsep yang lama untuk menyesuaikan kondisi yang terjadi saat ini.

Kemudian menjawab konsep apa yang seharusnya dilakukan untuk mengatasi penumpukan perkara agar tercapainya peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan, salah satu cara yang dapat digunakan adalah dengan mengesahkan terlebih dahulu pada pasal 199 RUU-KUHAP yang menjelaskan

- (1) Pada saat penuntut umum membacakan surat dakwaan, terdakwa mengakui semua perbuatan yang didakwakan dan mengaku bersalah

melakukan tindak pidana yang ancaman pidana yang didakwakan tidak lebih dari 7 (tujuh) tahun, penuntut umum dapat melimpahkan perkara ke sidang acara pemeriksaan singkat.

- (2) Pengakuan terdakwa dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh terdakwa dan penuntut umum.
- (3) Hakim wajib: a. memberitahukan kepada terdakwa mengenai hak-hak yang dilepaskannya dengan memberikan pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2); b. memberitahukan kepada terdakwa mengenai lamanya pidana yang kemungkinan dikenakan; dan c. menanyakan apakah pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan secara sukarela.
- (4) Hakim dapat menolak pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jika hakim ragu terhadap kebenaran pengakuan terdakwa.
- (5) Dikecualikan dari Pasal 198 ayat (5), penjatuhan pidana terhadap terdakwa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak boleh melebihi $\frac{2}{3}$ dari maksimum pidana tindak pidana yang didakwakan.

Karena pasal tersebut akan membantu mempercepat jalannya persidangan, yang mana dengan pengakuan terdakwa maka proses acara persidangan dilaksanakan ke sidang acara pemeriksaan singkat dengan ketentuan perkara yang memiliki batasan pidana maksimal 7 tahun. Kemudian setelah itu ditambahkan pula ayat didalam pasal tersebut, bahwa ketika sudah mendapatkan pengakuan dari terdakwa yang kemudian dilaksanakan pemeriksaan singkat maka akan langsung memiliki kekuatan hukum tetap dan tidak dapatnya dimintakan kembali terhadap upaya hukum apapun setelahnya, baik itu upaya hukum banding maupun kasasi bahkan hingga peninjauan kembali. Karena pula sudah mendapatkan pengakuan dari terdakwa, sehingga hal tersebut sudah menjelaskan apa yang didakwakan sudah diakui kebenarannya dan harus menerima putusan hakim yang akan dijatuhkan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku terkait perkaranya.

Selain konsep sebelumnya tersebut, jika belum/ tidak dapat juga untuk disetujui/ disahkan terkait pasal dalam RUU-KUHAP, maka dapat pula dengan menerapkan konsep pembatasan terhadap lamanya waktu pidana yang dijatuhkan. Sebelumnya konsep ini sudah diterapkan, sebagaimana yang telah terdapat dalam pasal 45A ayat 2 huruf b yang menjelaskan bahwa “perkara yang oleh Undang-Undang dibatasi untuk diajukan kasasi yaitu perkara pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau diancam pidana denda”.

Akan tetapi konsep tersebut saat ini masih kurang efektif, karena sistem tersebut sudah tidak sesuai lagi untuk diterapkan saat ini. Karena hingga saat ini pula nyatanya masih adanya penumpukan perkara dalam tingkat kasasi di Mahkamah Agung. Sehingga menurut penulis, hal ini dikarenakan masih sedikitnya batasan waktu yang diberikan. Pendapat penulis dalam hal ini agar untuk ditingkatkan batasan waktu tersebut untuk dapat mengajukan upaya hukum kasasi pidana dirubah menjadi dikecualikan bagi terdakwa yang sudah mendapatkan putusan pidana selama 3 (tiga) tahun dan/atau diancam pidana denda tentunya.

Sehingga dari situ mampu mengurangi penumpukan dari perkara yang besar pidananya maksimal 3 (tiga) tahun kebawah atau yang memang dijatuhkan oleh hakim dengan pidana sebesar 3 (tiga) tahun penjara. Karena perkara yang maksimal pidana 3 (tiga) tahun kebawah tersebut dirasa masih tergolong perkara-perkara yang ringan, seperti dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) pasal 256 dan 258 tentang perdagangan tidak sehat

yang memiliki pidana maksimal 3 (tiga) tahun, pasal 270, 271, 274 tentang pemalsuan surat/keterangan, pasal 281, 282, 283 tentang kesusilaan, pasal 351 ayat (1), 352 tentang penganiayaan ringan yang pidananya maksimal 2 (dua) tahun atau lebih dan kurang dari 3 (tiga) tahun, kemudian pasal 310 tentang pencemaran nama baik, pasal 179, 180 tentang pengrusakan kuburan yang pidananya maksimal 1 (satu) tahun atau lebih dan kurang dari 3 (tiga) tahun, beserta pasal-pasal pidana lainnya yang berat pidananya maksimal 3 (tiga) tahun kebawah.

Kemudian selain pembatasan upaya hukum dari aspek hulu tersebut, perlu juga di adopsi sistem yang telah digunakan beberapa negara lainnya dalam rangka pembatasan permohonan upaya hukum, demi terkontrolnya perkara yang masuk dan diselesaikan untuk diputus mampu seirama. Hal tersebut bertujuan agar tercapainya asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan serta mampu dalam mengatasi permasalahan penumpukan perkara yang terjadi dari waktu-waktu sebelumnya.

Terkait pilihan tentang strategi/mekanisme pembatasan perkara yang tepat untuk diterapkan di Indonesia akan sangat tergantung pada dua hal: apa fungsi MA yang ideal dalam konteks Indonesia dan model pembatasan perkara seperti apa yang sesuai dengan konteks Indonesia, dengan memahami kelebihan dan kekurangan masing-masing model. Sebelum kita masuk ke usulan yang dihasilkan penelitian ini mengenai strategi pembatasan perkara yang perlu diambil oleh pembuat UU, akan dijelaskan terlebih dahulu dua hal yang menjadi dasar pemikiran usulan tersebut, yakni yang berhubungan

dengan fungsi MA yang dianggap ideal serta model pembatasan perkara yang cocok dalam konteks Indonesia.

Berdasarkan pendapat berbagai pihak, penelitian ini berkesimpulan bahwa fungsi utama MA adalah untuk menjaga kesatuan hukum (keseragaman penafsiran atau penerapan hukum) guna mencapai kepastian hukum dan keadilan serta mendorong perkembangan hukum (melalui penafsiran-penafsirannya atas kasus konkret sesuai dengan perkembangan masyarakat). Melalui putusan-putusannya, yang seharusnya diikuti oleh pengadilan tingkat bawah, dapat diminimalisir munculnya kesalahan-kesalahan dalam menerapkan hukum atas masalah yang sudah terang penafsirannya di kasus-kasus mendatang. Di sisi lain, sebagai pengadilan terakhir (the last bastion of justice), sudah seharusnya pula MA memiliki peran dalam menetapkan standar dan melakukan pengawasan pelaksanaan prinsip due process of law, meski dalam kasus-kasus yang bersifat individual, serta mengoreksi kesalahan penerapan hukum yang serius dari pengadilan yang lebih rendah dalam menangani suatu perkara.

Kemudian membahas mengenai model pembatasan perkara yang cocok dalam konteks upaya hukum kasasi di Indonesia. Seperti di Amerika Serikat misalnya, Supreme Court diberi kewenangan proses certiorari. Konstitusi Amerika tidak memaksa Mahkamah Agung untuk menerima semua perkara agar diselesaikan. Jadi, Konstitusi memberikan kebijakan kepada Mahkamah Agung untuk menyeleksi atau memilih dan memilah sebagian besar daftar perkara yang akan ditangani, mengingat jumlah perkara yang dimohonkan

begitu banyak dan jumlah Hakim Agung yang ada di Mahkamah Agung sangat terbatas.⁵⁵

Mahkamah Agung nantinya, dapat menentukan sendiri kualitas perkara yang dapat ditangani, meskipun perkara itu sudah atau sedang ditangani oleh pengadilan di tingkat bawahnya. Prinsip semacam certiorari ini juga dapat memberikan perlindungan hukum bagi pencari keadilan yang merasa substansi perkaranya seharusnya diselesaikan oleh Mahkamah Agung. Prinsip tersebut juga dalam ranah penerapan hukum, bukan penyelesaian fakta hukum.

Akan tetapi penerapan model ini pun tidak luput dari berbagai kelemahan. Model ini pun, sebagaimana dijelaskan sebelumnya, tidak luput dari berbagai kelemahan. Dalam konteks kepercayaan masyarakat terhadap MA yang masih relatif rendah dan diragukannya integritas sebagian hakim agung, model ini akan memunculkan kecurigaan bahwa 'proses seleksi' perkara yang dilakukan MA nantinya akan dipengaruhi oleh faktor-faktor yang tidak obyektif. Selain itu, dengan berbagai masalah struktural dan kultural yang ada perilaku negatif sebagian para pihak, advokat atau jaksa penuntut umum yang kerap mengajukan perkara yang tidak layak, kinerja rendah sebagian hakim agung dan budaya kerja dan organisasi MA yang lemah atau bukan mustahil jumlah permohonan yang akan masuk ke MA akan lebih besar lagi dan beban kerja hakim agung akan bertambah (karena untuk menyeleksi perkara mana yang penting, memiliki nilai bagi kesatuan hukum dan perkembangan hukum

⁵⁵ John Pul Jones, Mahkamah Agung : Suatu Lembaga Unik, dalam Michael Jay. Friedman (Editor), Mahkamah Agung Amerika Serikat Pengadilan Tertinggi di Amerika Serikat, Biro Program Informasi Internasional Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, hlm. 14.

namun karena pembatasan yang ada tersebut menjadi tidak dapat diperiksa oleh MA.

Agar kewenangan Mahkamah Agung untuk menentukan layak atau tidaknya perkara kasasi berjalan efektif, ada baiknya menggunakan sistem *advice second opinion* seperti yang diterapkan di Belanda. Opini hukum (*advies*) ini diberikan oleh tenaga ahli sebelum berkas perkara diterima Hakim Agung. Hoge Raad dalam proses memeriksa dan memutus dibantu oleh sekelompok ahli yang dikoordinasikan oleh *advocaat General* pada Hoge Raad. Masing-masing kamar mempunyai 5 sampai 6 orang *advocaat General* dan mereka didukung oleh total sekitar 100 orang tenaga ahli yang melaksanakan fungsi pembuatan opini hukum terhadap seluruh perkara yang masuk, kecuali perkara pajak. Mereka dikenal dengan istilah *Parquet* (*Parquette*), yang fungsi pokoknya adalah menyampaikan pendapat maupun nasihat kepada Hoge Raad. Mereka merupakan kelompok independen terhadap lembaga eksekutif, legislatif, dan partai politik. Opini hukum yang dibuat *Parquet* merupakan kajian terhadap fakta hukum yang harus diputus, pertanyaan hukum yang harus dijawab, pendapat akademis dan yurisprudensi yang pernah dibuat Hoge Raad. Bahkan *Parquet* juga memberikan alternatif solusi yang dapat diambil oleh Hoge Raad, meskipun pada akhirnya Hoge Raad tidak terikat pada opini hukum tersebut, setidaknya dapat membantu agar tidak terjadi disparitas putusan yang pernah diputus oleh Hoge Raad.⁵⁶

⁵⁶ Tidak berjalannya fungsi kepaniteraan, lihat Sistem Kamar Mahkamah Agung RI, 2012, Rakernas Mahkamah Agung RI, Manado, hlm. 6.

Sehingga untuk menjawab masalah yang mungkin muncul karena penerapan model diskresional dari konsep negara amerika tersebut (obyektifitas seleksi perkara serta besarnya jumlah perkara yang masuk ke MA melalui jalur ini karena alasan-alasan yang tidak sesuai) diusulkan untuk dibentuk tim khusus di MA yang tugasnya hanyalah untuk melakukan proses seleksi perkara saja. Perkara yang “lolos seleksi” akan diserahkan kepada tim lain yang fungsinya memeriksa dan memutus substansi perkara seperti yang berjalan saat ini. Untuk memastikan tim seleksi dapat bekerja efektif, proses seleksi untuk setiap permohonan kasasi dapat dilakukan oleh satu atau dua hakim agung. Jika ada perbedaan diantara kedua hakim agung tersebut baru ditambah satu orang hakim agung lainnya lagi. Dengan demikian, walaupun banyak perkara yang akan masuk ke tim khusus yang melakukan seleksi, hal ini tidak akan mengganggu kinerja tim lain yang khusus bertugas menangani substansi perkara. Selain itu, model ini dapat meminimalisir penyalahgunaan diskresi karena tim yang melakukan seleksi perkara tidak memiliki kepentingan langsung terhadap perkara yang diajukan.

Kemudian model selanjutnya yaitu penerapan yang mirip dengan lembaga certiorari berlaku di Australia, yaitu adanya acara singkat 20 menit di Mahkamah Agung (Hight Court) Australia. Dalam acara singkat ini, setiap perkara yang dapat kasasi harus minta izin terlebih dahulu ke Mahkamah Agung. Fungsi acara singkat adalah untuk dapat diterima atau tidaknya suatu perkara menjadi perkara yang dapat diajukan kasasi. Dikatakan singkat, karena acara tersebut hanya berlangsung selama 20 menit dan segera pada saat

itu juga harus diputuskan apakah dapat diterima atau tidak untuk dilanjutkan ke persidangan kasasi.⁵⁷ Ukuran kelayakan perkara itu dilanjutkan ke tingkat kasasi adalah dengan melihat arti pentingnya perkara yang akan ditangani, seandainya menurut Mahkamah Agung tidak memiliki arti penting maka tidak ada gunanya atau sia-sia saja apabila tetap diteruskan ke tingkat kasasi. Untuk itu untuk melihat arti pentingnya perkaratelah diatur menurut *Section 35A judiciary Act 1903*, adanya pemilihan kasus yang menjadi kewenangan dengan berdasarkan pada kriteria:

- 1) Perkara tersebut memiliki permasalahan hukum yang harus dijawab;
- 2) Perkara tersebut menyangkut kepentingan publik yang luas;
- 3) Perkara tersebut diputus berbeda oleh dua pengadilan dibawahnya.

Berdasarkan beberapa konsep yang akan diadopsi dari negara lain untuk diterapkan di Indonesia, jika dikombinasikan akan diperlukan beberapa tahapan untuk dilakukan. Tahap pertama yaitu dengan memberikan kewenangan kepada Mahkamah Agung untuk menerima atau menolak perkara dengan menyaring kasus yang layak untuk di adili atautakah tidak. Kemudian pembentukan tim khusus terlebih dahulu untuk menyeleksi perkara yang masuk untuk disaring layak atau tidaknya perkara yang diajukan ke Mahkamah Agung. Selanjutnya mengatur bahwasannya dalam pemilihan kasus yang menjadi kewenangan dengan menilai berdasarkan kriteria seperti permasalahan hukum yang harus dijawab, menyangkut kepentingan publik

⁵⁷ Lintong Oloan Siahaan, Laporan Kunjungan Kerja Ke Berbagai Pengadilan dan PraktisiPraktisi Hukum di Melbourne, Sydney dan Canberra – Australia, tanpa tahun, hlm. 19.

yang luas dan perkara yang telah diputus berbedda oleh dua pengadilan dibawahnya. Dan mengatur untuk diadakan acara singkat untuk pembacaan penentuan diterima atau tidaknya menjadi perkara yang diajukan kasasi.

Sehingga untuk dapat mengimplementasikan rekomendasi-rekomendasi yang terdapat dalam pembahasan ini, maka dibutuhkannya perubahan-perubahan atau penambahan dalam beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Mahkamah Agung.

- 1) Point-point utama perubahan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman
 - a. Membentuk tim khusus atau lembaga independen dibawah Mahkamah Agung sebagai pengkaji penyeleksi perkara untuk menentukan diterima atau tidaknya upaya hukum yang dimohonkan.
- 2) Point-Point utama perubahan Undang-Undang Mahkamah Agung
 - a. Mengubah ketentuan yang diatur dalam pasal 45A ayat (2) huruf b menyatakan bahwa pengecualian syarat perkara untuk dapat diajukan kasasi yaitu perkara pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau diancam pidana denda.
 - b. Menambahkan pasal yang menyatakan Mahkamah Agung diberikan kewenangan untuk menerima atau menolak perkara yang dimohonkan upaya hukum berdasarkan hasil kajian/penyaringan oleh tim khusus/lembaga independen yang telah dibentuk oleh Mahkamah Agung.

c. Menambahkan pasal yang menyatakan pemilihan kasus yang menjadi kewenangan untuk dipertimbangkan dengan berdasarkan pada kriteria:

- 1) Perkara tersebut memiliki permasalahan hukum yang harus dijawab;
- 2) Perkara tersebut menyangkut kepentingan publik yang luas;
- 3) Perkara tersebut diputus berbeda oleh dua pengadilan dibawahnya.

d. Menambahkan pasal yang menyatakan dalam menentukan untuk dapat diterima atau tidaknya suatu perkara menjadi perkara yang dapat diajukan kasasi, maka diadakan acara singkat selama 20 menit.

Berjalan atau tercapainya seluruh konsep diatas menjadikan upaya hukum kasasi dalam peradilan pidana agar sesuai dengan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan dapat mulai diterapkan di Indonesia dengan adanya kepastian hukum. Sehingga penerapan konsep tersebut diharapkan dapat menekan jumlah penumpukan perkara pula dalam Mahkamah Agung untuk dapat dikendalikan.